



Diplomasi

BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PERTANIAN

**Dorong Akselerasi Ekspor
Produk Pertanian melalui
Fasilitasi Kerja Sama Teknis**

3

Fasilitasi Akses Pasar
*Naikkan Harga, Indonesia
Batasi Ekspor Karet*

11

Kerja Sama Teknis
*Membangun Pusat Pertanian
Indonesia di Tanah Fiji*

19

Fasilitasi Investasi
*Unit Pengolahan Sagu
Terintegrasi Pertama di Dunia*

Redaksi

Tim Pengelola Informasi, Dokumentasi dan Buletin (PIDB)

Biro Kerja Sama Luar Negeri,
Sekretariat Jenderal - Kementan RI

Saran dan kritik dapat disampaikan melalui:
publikasi.kln@gmail.com

Fasilitasi Akses Pasar

- Brasil Fasilitasi Akses Pasar Komoditas Hortikultura dan Perkebunan
- Pertemuan Bilateral Menteri Pertanian RI - Wakil Presiden Argentina: Indonesia Dorong Argentina Perluas Akses Pasar
- Plt. Sekjen Kementan Sambut Dirjen FAO Baru 2019-2023: Indonesia Dijanjikan Isi Dua Jabatan Tinggi Strategis FAO
- Naikkan Harga, Indonesia Batasi Ekspor Karet
- Pembentukan SSI Indonesia: Upaya Mengembalikan Kejayaan Rempah Nusantara yang Berkelanjutan

Kerja Sama Teknis

- Dukung Dekade Pertanian Keluarga PBB, Kementan Inisiasi Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pertanian Keluarga 2019-2028
- Membangun Pusat Pertanian Indonesia di Tanah Fiji
- Menduniakan Tenaga Ahli Pertanian Indonesia Melalui FAO *South-South Cooperation Gateway* dan Rencana Penandatanganan MoU
- Ormas Asing Mercy-USA: Mitra Pemerintah dalam Menjalankan Program Pertanian
- Kementan Dorong Kerja Sama Penanganan *Food Loss and Waste* antar CSO Indonesia - Turki

Fasilitasi Investasi

- Indonesia Miliki Unit Pengolahan Sagu Terintegrasi Pertama di Dunia dengan Bantuan FAO
- Proyek Kemitraan Publik-Swasta untuk Perbaikan Sistem Pemasaran dan Distribusi Produk Pertanian
- SMARTD, Proyek Pinjaman Kementan dengan Penyerapan & Penyelesaian Terbaik
- **Highlights Pertemuan KLN Apr - Mei - Jun**
- **Kegiatan KLN Apr - Mei - Jun**
- **Agenda KLN Jul - Aug - Sept**



Diplomasi

Kementerian Pertanian cq. Biro Kerja Sama Luar Negeri telah melakukan berbagai upaya kerja sama teknis untuk mendorong akselerasi ekspor komoditas pertanian dan investasi yang telah dirangkum dalam Buletin DIPLOMASI Edisi II Tahun 2019 ini.

Fasilitasi akses pasar, kerja sama teknis dan investasi dilakukan dalam berbagai kerangka kerja sama bilateral, regional, dan multilateral, dengan negara mitra, organisasi internasional pemerintah dan non-pemerintah, pihak swasta dan lembaga penelitian. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk kontribusi konkret Pemri dalam mencapai 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030.

Penerbitan Buletin Diplomasi setiap triwulan ini dimaksudkan sebagai media penyebarluasan informasi kegiatan kerja sama internasional sektor pertanian. Berbagai upaya kerja sama yang telah dilakukan diharapkan dapat berdampak positif bagi pembangunan pertanian Indonesia.

Salam,
Dr. Ade Candradijaya
Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
Kementerian Pertanian



Fasilitasi Komoditas Ekspor Unggulan Melalui Promosi dan Harmonisasi Regulasi



Brasil Fasilitasi Akses Pasar Komoditas Hortikultura dan Perkebunan



Pertemuan Bilateral Menteri Pertanian RI - Wakil Presiden Argentina: Indonesia Dorong Argentina Perluas Akses Pasar



Plt. Sekjen Kementan Sambut Dirjen FAO Baru 2019-2023: Indonesia Dijanjikan Isi Dua Jabatan Tinggi Strategis FAO



Naikkan Harga, Indonesia Batasi Ekspor Karet



Pembentukan SSI Indonesia: Upaya Mengembalikan Kejayaan Rempah Nusantara yang Berkelanjutan



Brasil Fasilitasi Akses Pasar Komoditas Hortikultura & Perkebunan

Kementerian Pertanian terus mendorong ekspor komoditas pertanian melalui peningkatan hubungan kerja sama dengan negara-negara pasar non tradisional, termasuk Brasil. Hal ini dapat dilihat pada saat Menteri Pertanian RI menerima kunjungan Menteri Pertanian, Peternakan dan Pangan Brasil, Y.M. Mrs. Tereza Cristina, pada tanggal 20 Mei 2019 di Kantor Kementerian Pertanian Pusat di Jakarta.

Pertemuan ini berhasil menyepakati penguatan kemitraan strategis antar kedua negara, melalui percepatan implementasi MOU bidang pertanian yang mencakup akses pasar, kerja sama teknis, dan investasi kedua negara. Hal ini termasuk di antaranya pemberian ruang ekspor bagi Indonesia untuk komoditas mangga, manggis, salak, dan nanas. Dalam hal fasilitasi akses pasar, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan nilai ekspor komoditas strategis pertanian Indonesia yang selama ini telah masuk ke pasar Brasil, di antaranya kelapa sawit, karet, dan kelapa, disertai dengan permintaan penurunan tarif kepada Brasil.

Kelapa sawit merupakan komoditas ekspor utama Indonesia ke Brasil yang mencapai 239 ribu ton pada tahun 2018 dengan nilai ekspor menyentuh angka US\$ 0,3 miliar per tahunnya, sedangkan karet, kakao, dan kelapa menyusul sebagai komoditas ekspor utama Indonesia selanjutnya. Karet Indonesia mendominasi separuh dari total impor karet Brasil.

Meskipun demikian, tarif yang dihadapi oleh Indonesia masih tergolong cukup tinggi, yaitu sebesar 20% untuk kelapa sawit, 14% untuk karet, 10% untuk kakao, dan 18,5% untuk kelapa. Oleh karena itu, pada pertemuan bilateral tersebut, Mentan RI secara spesifik meminta penurunan tarif untuk komoditas unggulan sub-sektor perkebunan Indonesia, paling tidak menjadi sama dengan tarif kedelai Brasil yang dikenakan oleh Indonesia sebesar 2,5%.

FASILITASI AKSES PASAR

Selain itu, Indonesia juga berharap agar Brasil dapat membuka peluang pasar baru untuk komoditas lainnya seperti manggis, salak, dan kakao. Produksi nasional manggis dan salak mencapai 800 ribu ton dan 200 ribu ton pada tahun 2018 lalu, sedangkan kakao, meskipun merupakan tiga besar komoditas impor utama Brasil, Indonesia belum dapat bersaing di pasar Brasil karena pangsa pasar domestik dikuasai oleh kakao Ghana yang mencapai 92,2%.

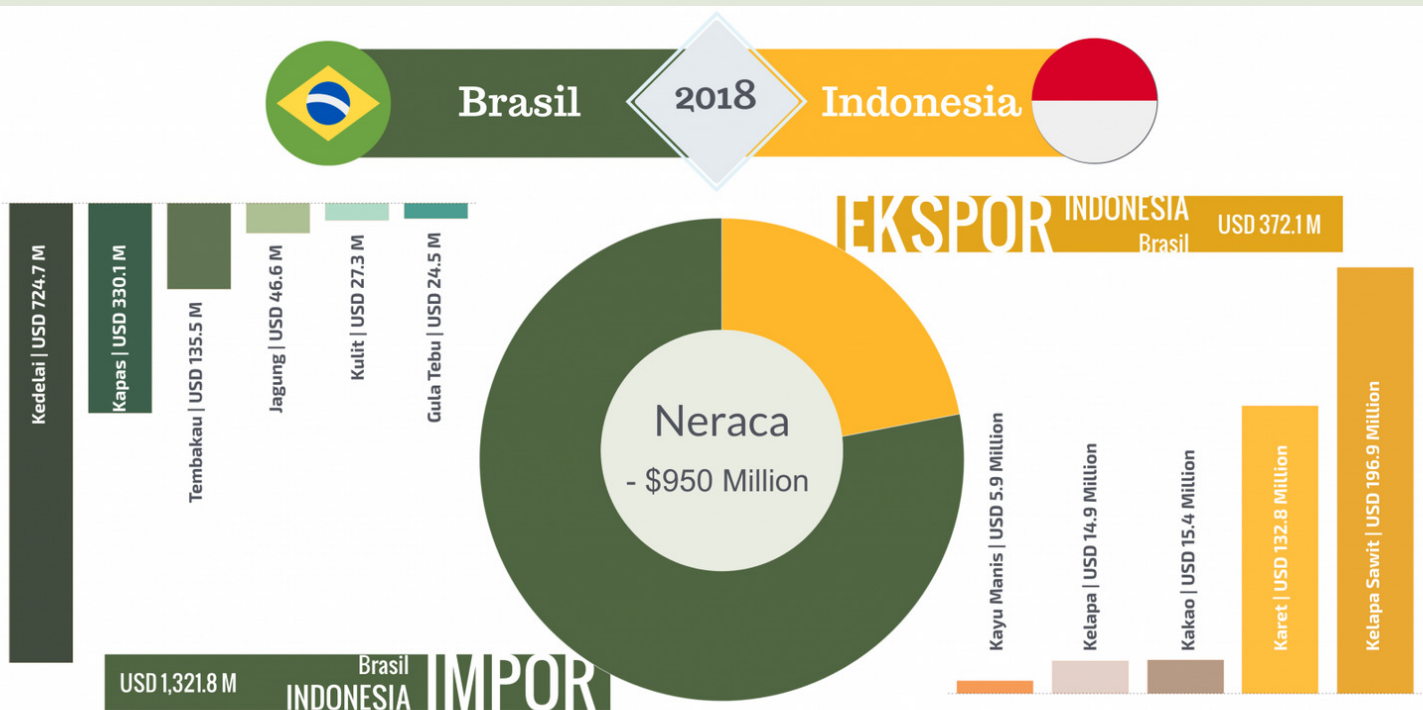
Menanggapi permintaan Indonesia, Menteri Tereza Cristina menyampaikan akan membantu fasilitasi akses pasar komoditas manggis, salak dan kakao, termasuk memberikan penurunan tarif untuk kelapa sawit, karet, dan kelapa.

Dalam hal fasilitasi investasi, Kementan mengundang Brasil sebagai negara maju dalam bidang industri pergulaan dan teknologi pengembangan pertanian untuk menanamkan investasi dan alih teknologi dalam pengembangan industri gula yang sedang digalakkan kembali oleh Pemri. Brasil merupakan negara produsen gula terbesar di dunia yang menguasai lebih dari separuh total pasar gula dunia.

Terkait keinginan pihak Brasil untuk memasukkan daging sapi ke Indonesia, Mentan RI menyampaikan bahwa saat ini proses pengkajian untuk rekomendasi importasi daging sapi sedang berjalan. Pada prinsipnya Indonesia terbuka dengan ekspor daging sapi dari seluruh dunia, termasuk Brasil, sepanjang memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh Indonesia, seperti bebas penyakit *Foot Mouth Disease* (FMD), *Bovine Spongiform Encephalopathy* (BSE), Standar HALAL, dan harga daging yang murah.

Sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar keempat dan kelima di dunia, berbagai upaya ini diharapkan dapat mendorong percepatan kerja sama perdagangan komoditas pertanian antara Indonesia dan Brasil. Hal ini mengingat kinerja perdagangan Indonesia dan Brasil saat ini masih di bawah 1% dari total perdagangan kedua negara di dunia.

Untuk itu, Biro KLN Kementan akan terus menindaklanjuti berbagai komitmen yang dihasilkan dari pertemuan ini, khususnya terkait dengan rencana dibukanya akses pasar komoditas manggis dan salak Indonesia ke Brasil yang akan dapat memberikan peluang baru bagi Indonesia.



Sumber: Pusdatin, 2019

Pertemuan Bilateral Menteri Pertanian RI - Wakil Presiden Argentina: Indonesia Dorong Argentina Perluas Akses Pasar

Kementerian Pertanian terus mendorong investasi di bidang pertanian. Hal ini dapat dilihat pada saat pertemuan the 4th Consultation Meeting on Agriculture between Indonesia Economic and Trade Office (IETO) in Taipei dan Taipei Economic Trade and Office (TETO) in Jakarta, pada tanggal 18 September 2019 di Bogor. Pertemuan yang dibuka oleh Kepala IETO dan TETO ini membahas investasi asing pada industri benih dan bibit di Indonesia. Saat ini sedang dilakukan proses untuk amandemen UU No. 13 Tahun 2010 terkait besarnya penanaman modal asing. Amandemen ini dilakukan agar besarnya investasi asing dapat melebihi 30%.

Melalui pertemuan tersebut, Kementan juga berupaya agar pihak Taiwan dapat membuka akses pasar komoditas manggis Indonesia, mengingat nilai ekspor hortikultura, sebesar US\$ 10 juta, masih jauh di bawah nilai ekspor perkebunan yang memiliki nilai ekspor terbesar, US\$ 104 juta.

Pertemuan ini juga berhasil menyepakati untuk memperkuat kerja sama teknis di bidang pertanian, di antaranya melalui proyek demfarm Karawang dan program magang petani muda Indonesia ke Taiwan. Proyek demfarm Karawang mencakup enam bidang, yaitu irigasi, budidaya padi, rice processing, budidaya itik, budidaya hortikultura, serta penguatan kelembagaan petani. Sedangkan program magang akan mengirimkan 300 orang petani muda ke Taiwan untuk mempelajari sistem pengembangan pertanian modern dan komersial di Taiwan selama satu tahun.



FASILITASI AKSES PASAR

Dalam pertemuan tersebut, Mentan RI mengharapkan agar Wapres Argentina dapat membuka akses pasar yang sebesar-besarnya untuk beberapa komoditas pertanian Indonesia, seperti nanas, pisang, manggis, salak, kopi, lada, dan sarang burung walet. Pada figur neraca perdagangan bilateral sektor pertanian tahun 2018, Indonesia masih berada pada angka defisit lebih dari USD 1,3 Miliar.

Melalui pertemuan ini juga, diharapkan akan memberikan perluasan peluang pasar bagi produk perkebunan dan hortikultura Indonesia lainnya.

Ekspor komoditas terbesar Indonesia ke Argentina meliputi karet, kelapa, kelapa sawit, kakao, pala, kapas, dan cengkeh. Ekspor perkebunan sebanyak 28 ribu ton, senilai US\$ 40 juta dengan komoditas utama karet, kelapa, dan kelapa sawit. Sementara itu, ekspor komoditas hortikultura ke Argentina masih tertinggal jauh, dengan nilai US\$ 6 juta. Untuk itu, pembukaan akses pasar beberapa komoditas, seperti nanas, pisang, manggis, dan salak, diprediksi dapat berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia-Argentina.

Bagi Argentina, Indonesia merupakan negara tujuan ekspor kedua di Asia setelah Tiongkok. Impor utama Indonesia dari Argentina didominasi oleh gandum, kedelai, dan jagung. Kepentingan Argentina lainnya adalah keinginan untuk memasukkan daging sapi asal Argentina ke Indonesia. Permintaan ini akan dikaji oleh tim teknis Kementerian Pertanian RI, sesuai dengan tahapan-tahapan yang berlaku di Indonesia guna meminimalisir risiko munculnya jangkitan penyakit hewan yang terbawa dari lalu lintas komoditas yang diperdagangkan, mengingat terdapat perbedaan status jangkitan penyakit hewan berdasarkan publikasi OIE (Organisasi Kesehatan Hewan Dunia), di mana Indonesia bebas FMD, sementara Argentina masih berstatus bebas dengan vaksinasi berdasarkan zona.

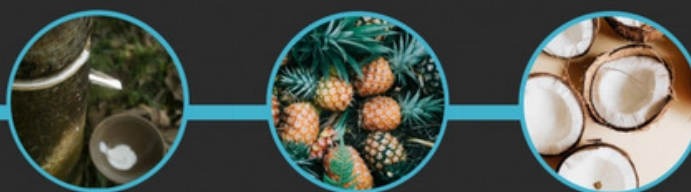
Indonesia - Argentina



- 2 Argentina adalah tujuan ekspor terbesar kedua di Kawasan Amerika Latin.



- 3 Tiga komoditas unggulan ekspor pertanian ke Argentina.



4

Neraca perdagangan RI - Argentina pada tahun 2018 defisit USD 1,331.4 M

Plt. Sekjen Kementan Sambut Dirjen FAO Baru 2019-2023: Indonesia Dijanjikan Isi Dua Jabatan Tinggi Strategis FAO

Indonesia diwakili Plt. Sekjen Kementerian Pertanian, Dr. Momon Rusmono, memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Dr. Qu Dongyu sebagai Direktur Jenderal FAO untuk empat tahun ke depan (2019-2023) pada pemilihan langsung yang dilaksanakan sebelum Sidang FAO Conference ke-41, Minggu 23 Juni 2019. Qu Dongyu berhasil mendapatkan suara sebanyak 108, mengalahkan kandidat Perancis dan Georgia dengan voting 71 dan 12 (1 suara abstain).

Dengan terpilihnya RRT sebagai perwakilan negara berkembang di wilayah Asia pada posisi DG FAO, Indonesia memiliki kesempatan untuk menduduki sedikitnya 2 (dua) jabatan strategis dalam manajemen FAO, yaitu *Deputy Director General* (DDG) dan *Assistant Deputy Director General* (ADG). Untuk itu, Kementan akan segera menentukan kandidat yang memenuhi persyaratan untuk mengisi jabatan krusial di atas.



Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan kesempatan baik ini untuk menyampaikan secara langsung undangan Menteri Pertanian kepada Dirjen FAO pada perayaan Hari Pangan Sedunia ke-39 yang akan dipusatkan di Kendari, Sulawesi Tenggara pada akhir bulan Oktober 2019. Kegiatan ini akan dibarengi dengan peluncuran Rencana Aksi Nasional Pertanian Keluarga sebagai salah satu bentuk upaya Pemerintah Indonesia untuk berkontribusi dalam komitmen global UN *Decade on Family Farming* 2019 - 2028.

Sementara itu, pada sesi *plenary* Sidang, Plt. Sekjen Kementan menyampaikan keberhasilan Indonesia dalam peningkatan minat generasi muda pada sektor pertanian melalui jalur pendidikan formal dan informal, seperti (1) transformasi Polbangtan; (2) program magang petani ke luar negeri; (3) program beasiswa pendidikan S2/S3 dan pelatihan SDM pertanian; serta (4) program kerja sama dengan lembaga keuangan PBB untuk pembangunan pertanian (IFAD) guna mendorong *agripreneurship* melalui proyek *Youth Entrepreneurship and Employment Support Services* (YESS). Upaya dan capaian ini mendapatkan apresiasi dari 192 perwakilan negara anggota FAO.

Di sela-sela Sidang, Delri juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian New Zealand dan menghasilkan beberapa kesepakatan penting di antaranya: (i) pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam rangka penguatan lembaga pendidikan, pelatihan serta penyuluhan; (ii) pelatihan dan pendidikan S2/S3 bagi pegawai Kementan di NZ melalui jalur khusus; (iii) penguatan kerja sama fasilitasi akses pasar, diantaranya melalui aplikasi sertifikasi elektronik (*e-cert*); dan (iv) kerja sama penanganan emisi gas rumah kaca (GRK) sektor pertanian melalui penguatan kemitraan dalam *Global Research Alliance* (GRA) dimana Kementan cq. Balitbangtan tahun ini akan menjadi tuan rumah pertemuan ke-9 *GRA Council Meeting* dan pertemuan ke-5 *Global Science Conference on Climate Smart Agriculture* pada bulan Oktober di Bali.



Naikkan Harga, Indonesia Batasi Ekspor Karet

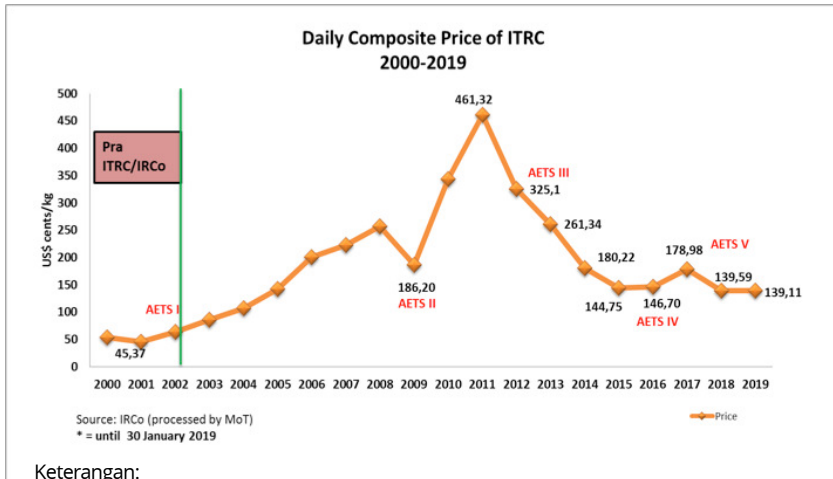
Tiga negara penghasil karet dunia, Thailand, Indonesia, dan Malaysia yang tergabung dalam *International Tripartite Rubber Council* (ITRC) menyatakan kekhawatirannya terkait kondisi pasar karet dunia saat ini. Pelemahan harga di bawah biaya produksi, yang terjadi beberapa periode terakhir diakibatkan adanya sentimen negatif dari pasar serta ketidakpastian ekonomi global, telah berdampak buruk bagi pendapatan dan kesejahteraan jutaan petani karet di seluruh negara produsen.

Untuk itu, pada pertemuan *Special Ministerial Committee Meeting of the International Tripartite Rubber Council* (ITRC) tahun 2019 disepakati penerapan tiga kebijakan yang bertujuan untuk mengatur jumlah ekspor karet alam (*Agreed Export Tonnage Scheme/AETS*), meningkatkan penggunaan karet alam di dalam negeri (*Demand Promotion Scheme/DPS*), serta peremajaan (*replanting*) karet alam (*Supply Management Scheme/SMS*).

Guna mengatasi tren harga karet dunia yang sempat menurun ke kisaran 1,21USD/Kg pada akhir 2018, implementasi AETS merupakan instrumen jangka pendek yang efektif untuk meningkatkan harga karet dengan cara mengurangi pasokan ekspor komoditas karet.

Tiga negara ITRC sepakat mengurangi ekspor karet sebanyak 200-300 ribu metrik ton. Dalam perkembangannya, AETS ke-1 pada tahun 2002 mengurangi 10% dari total ekspor karet alam; AETS ke-2 pada tahun 2009 memangkas 700.000 ton dari nilai ekspor; AETS ke-3 pada tahun 2012 memangkas 300.000 ton dari nilai ekspor selama 6 bulan; AETS ke-4 pada tahun 2016 memangkas 700.000 ton dari nilai ekspor; dan AETS ke-5 pada tahun 2018 memangkas 350.000 ton dari nilai ekspor.





Keterangan:

- Harga karet mengalami penurunan sejak tahun 2011.
- AETS/ Skema Tonase Ekspor yang disetujui efektif meningkatkan harga karet.
- AETS dapat berdampak positif jika semua anggota menerapkan dan mematuhi.

Indonesia, melalui Kementerian Perdagangan, menerbitkan Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 779 tahun 2019 tentang Pelaksanaan AETS ke-6 untuk karet alam. Skema kebijakan AETS disepakati pengurangan volume ekspor karet alam sebesar 240.000 ton selama empat bulan terhitung 1 April 2019 hingga 31 Juli 2019. Kemendag menugaskan Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) sebagai pelaksana AETS.

Mekanisme pengendalian harga karet lainnya yang diterapkan oleh ketiga negara ITRC adalah kebijakan *Demand Promotion Scheme* (DPS). Skema ini disepakati untuk meningkatkan konsumsi domestik karet alam pada berbagai proyek di dalam negeri hingga 10%. Indonesia menggunakan *natural rubber* untuk proyek infrastruktur, seperti pembangunan dan perawatan jalan provinsi dan kabupaten/kota, pemisah jalan, bantalan rel kereta api, sambungan jembatan dan daur ulang ban (*tyre retreading*).

Sementara Malaysia mengalokasikan 100 juta Ringgit bahan baku karet untuk pembangunan dan perawatan jalan di pelabuhan dan kawasan industri.

Thailand saat ini sedang menerapkan proyek lainnya yang akan meningkatkan tambahan serapan karet sebesar 270 ribu ton di luar proyeksi konsumsi domestik 700 ribu ton/tahun dan juga menerapkan operasi pasar strategis melalui enam pasar karet fisik yang meningkatkan volume perdagangan fisik sebesar 105,600 ton dengan total nilai 225 juta USD sepanjang tahun lalu.

Selain itu, untuk menjamin keseimbangan suplai dan permintaan karet di masa depan, ketiga negara ITRC juga sepakat mempercepat upaya penanaman kembali (*replanting*) tanaman karet melalui *Supply Management Scheme* (SMS). Indonesia akan memulai program *replanting* dengan total luas lahan 50 ribu hektar/tahun, Malaysia menerapkan program *replanting* seluas 25 ribu hektar/tahun, sementara Thailand meneruskan program *replanting* pohon karet mencapai luas 65 ribu hektar/tahun.

24.3%

Kontribusi Produksi Karet Indonesia di Dunia 2012-2016

1. Tiongkok
2. Uni Eropa
3. India

Top 3 Konsumen Karet Dunia (2017)

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Karet Alam | 1. Karet Sintetis |
| 2. Ban bertekanan baru | 2. Ban bertekanan baru |
| 3. Karet Sintetis | 3. Barang lain dari karet |

Top 3 Wujud Produksi Ekspor Karet Indonesia

Top 3 Wujud Impor Karet

(Exim Bank, 2017)



Pembentukan SSI Indonesia: Upaya Mengembalikan Kejayaan Rempah Nusantara yang Berkelanjutan

Kementerian Pertanian terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ekspor rempah Indonesia, khususnya ke kawasan Eropa. Salah satunya melalui kerja sama teknis dalam hal peningkatan kualitas dan mutu rempah agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pasar Uni Eropa.

Sustainable Spices Initiative (SSI) merupakan konsorsium dari perusahaan, pemerintah, dan LSM yang berpusat di Utrecht, Belanda. Inisiatif global ini dimulai sejak tahun 2011, bertujuan memastikan produksi dan rantai pasok rempah secara berkelanjutan, melalui peningkatan kualitas dan garansi keamanan pangan. Hal ini dianggap sejalan dengan komitmen Pemri dalam mengembalikan kejayaan rempah nusantara. Untuk itu, Kementan melakukan peninjauan kerja sama dengan SSI Global dalam pembentukan SSI Indonesia.

Sustainable Spices Initiative (SSI)



Tujuan penerapan SSI:

- ✓ Agar ada peningkatan kualitas
- ✓ Garansi keamanan pangan dan kebutuhan lain
- ✓ Meningkatkan posisi tawar petani rempah

Keunggulan rempah Indonesia:

- ✓ Aroma kuat
- ✓ Produksi besar
- ✓ Harga terjangkau

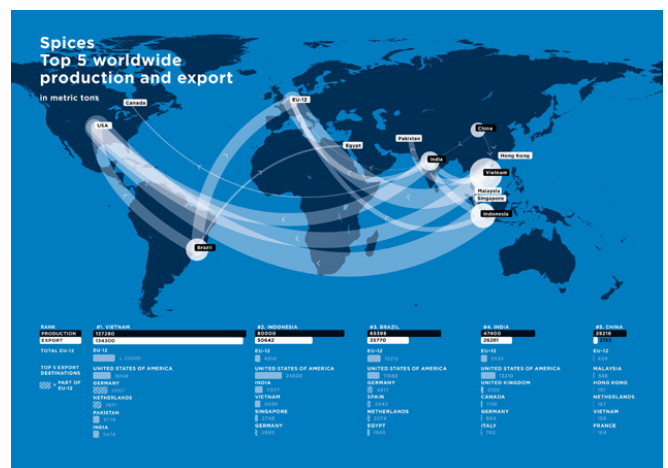
Menurut Lembaga Statistik Uni Eropa Eurostat, Indonesia memegang peranan besar dalam menyuplai kebutuhan rempah berupa pala, bunga pala, dan kapulaga

Twitter: @kementan
Facebook: @kementanRI
Instagram: @kementerianpertanian
YouTube: Kementerian Pertanian RI

Cakupan kegiatan dari kerangka kerja SSI Indonesia meliputi:

1. Peningkatan kapasitas petani dalam manajemen rempah dari pada tahap produksi, pascapanen, dan pemasaran
2. Pendampingan petani pada setiap tahapan, khususnya dalam mendorong masuk ke dalam *global supply chain* dan memberi kemudahan dalam akses pasar
3. Memastikan praktik industri rempah yang menjaga keberlanjutan lingkungan hidup
4. Mendorong industri rempah agar lebih berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitarnya
5. Pengelolaan kebijakan Pemri dan Uni Eropa (UE) untuk pengembangan dan pemasaran rempah berkelanjutan

Nota kesepahaman dan *executing plan* kerja sama Kementan RI dengan SSI Global saat ini sedang dirancang dan berpotensi difokuskan pada tiga komoditas rempah utama, yakni lada hitam/lada putih, pala, dan kayu manis.



Sumber: <http://www.standardsmap.org/ssi/>



Kerja Sama Teknis



Dukung Dekade Pertanian Keluarga PBB, Kementan Inisiasi Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pertanian Keluarga 2019-2028



Membangun Pusat Pelatihan Pertanian Regional Pasifik di Tanah Fiji



Menduniakan Tenaga Ahli Pertanian Indonesia Melalui FAO *South-South Cooperation Gateway* dan Rencana Penandatanganan MoU



Ormas Asing Mercy-USA: Mitra Pemerintah dalam Menjalankan Program Pertanian



Kementan Dorong Kerja Sama Penanganan *Food Loss and Waste* antar CSO Indonesia - Turki



Dukung Dekade Pertanian Keluarga PBB, Kementan Inisiasi Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pertanian Keluarga 2019-2028

Pertanian berbasis keluarga (*family farming*) memiliki potensi dan kontribusi signifikan dalam pemenuhan pangan masyarakat dunia. Lebih dari 80 persen pangan dunia dihasilkan melalui pertanian keluarga di negara berkembang dan negara maju.

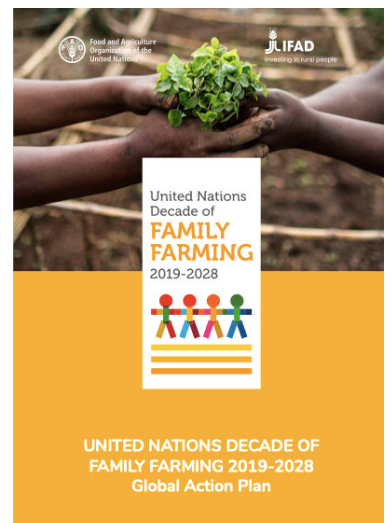
Pada tingkat global, perhatian terhadap pertanian keluarga dimulai sejak tahun 2014, yang ditetapkan sebagai UN *International Year of Family Farming* (IYFF). Penetapan ini memposisikan kembali pertanian keluarga sebagai inti kebijakan pertanian, lingkungan dan sosial dalam agenda pembangunan nasional/regional/global yang lebih setara dan seimbang. Berbagai dialog dan inisiatif dikembangkan untuk mendukung pertanian keluarga.

Pada tanggal 20 Desember 2017, dalam Sesi ke-72, Majelis Umum PBB mendeklarasikan Dekade Pertanian Keluarga PBB tahun 2019-2028 (*UN Decade of Family Farming*) yang berfungsi sebagai *framework* bagi negara-negara dalam mengembangkan kebijakan publik dan investasi untuk mendukung pertanian keluarga, serta berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Pertanian keluarga merupakan isu yang bersifat multidimensional. Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan UNDF, diperlukan pendekatan yang holistik dan didukung oleh kebijakan lintas-sektoral yang koheren secara berkelanjutan agar pengentasan kemiskinan di pedesaan dapat tercapai.

Sebagai panduan pelaksanaan, **Rencana Aksi Global Pertanian Keluarga 2019-2028** telah diluncurkan yang berisi 7 pilar kerja yang sejalan dengan prinsip-prinsip SDGs. Dokumen ini menjadi dasar implementasi UNDF bagi setiap negara dalam berkontribusi pada pelaksanaan UNDF.

Sekretariat menargetkan 100 Rencana Aksi Nasional Pertanian Keluarga pada tahun 2024 dan akan direviu setiap 2 tahun. Untuk itu, Kementerian Pertanian telah menginisiasi penyusunan Rencana Aksi Nasional tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan diharapkan RAN-PK dapat diluncurkan pada saat HPS tahun ini.



Kementan Paparkan Strategi Kebijakan dan Program Pertanian Keluarga di Hadapan Anggota FAO dan IFAD

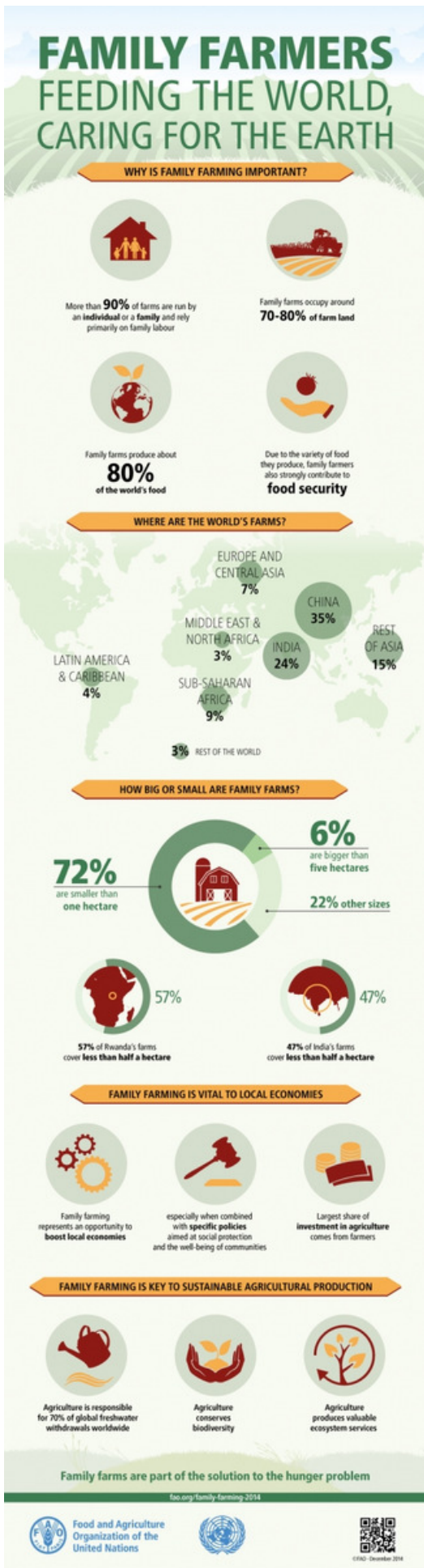
Sekjen Kementan, Syukur Iwantoro, bersama dengan Menteri Pertanian dan Kehutanan Angola, Menteri Pertanian dan Peternakan Costa Rica, dan Menteri Pertanian, Perikanan dan Pedesaan Sao Tome dan Principe, menjadi panelis pada sesi *Ministerial Segment* dalam rangka Peluncuran Global Dekade dan Rencana Aksi Pertanian Keluarga PBB 2019-2028 di Kantor Pusat FAO, Roma, Italia, Rabu (29/5) siang waktu setempat.

Pada kesempatan ini, Sekjen Kementan memaparkan kebijakan, capaian, dan pengalaman Indonesia dalam mendukung pertanian keluarga untuk memperkuat basis ketahanan pangan masyarakat. Berbagai kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kontribusi pertanian keluarga dalam mewujudkan SDGs.

Sebagai contoh, Program KRPL yang dilaksanakan sejak tahun 2010 telah memberikan berbagai dampak positif bagi keluarga petani di seluruh wilayah Indonesia. Pemanfaatan pekarangan rumah sebagai lahan tanam terbukti telah berhasil mengubah pola pengeluaran dan konsumsi pangan rumah tangga. Pola diet masyarakat mengalami peningkatan dan prevalansi *stunting* menjadi 30,8% pada 2018, angka ini turun dibandingkan tahun 2013 sebesar 37,2%. Sedangkan Program #BEKERJA telah memberikan pilihan mata pencaharian yang lebih baik dan memastikan pencapaian inklusif sosial ekonomi, ketahanan, dan kesejahteraan petani keluarga. Selama dua tahun sejak diinisiasi, program ini telah memberikan manfaat bagi lebih dari setengah juta rumah tangga miskin di Indonesia.

Untuk mendorong partisipasi generasi muda, Kementan mengembangkan program untuk menciptakan *agripreneur* muda yang sukses, melalui Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), kelompok Pengembangan Wirausaha Muda Pertanian (PWMP), dan proyek YESS yang merupakan kerja sama dengan IFAD. Dalam penerapan strateginya, *digital agriculture* juga dipromosikan untuk menarik generasi milenial ke sektor pertanian. Upaya dan capaian berbagai program yang disampaikan tersebut mendapatkan apresiasi positif dari peserta pertemuan.

Keseriusan Indonesia dengan menginisiasi pertemuan *Regional Conference* untuk wilayah Asia Tenggara, bulan April lalu di Jakarta, juga dipandang sebagai wujud konkret komitmen Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Dekade PBB ini. Komunike Bersama yang dihasilkan dalam pertemuan menggarisbawahi komitmen bersama dan menyoroti konvergensi kebijakan antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam meningkatkan kesejahteraan petani skala kecil, terutama wanita dan pemuda. Selain itu, Dirjen FAO juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Indonesia sebagai salah satu dari 24 negara anggota *Internasional Steering Committee* yang secara aktif mendukung pelaksanaan Dekade Pertanian Keluarga ini.



Membangun Pusat Pelatihan Pertanian Regional Pasifik di Tanah Fiji

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian Indonesia bekerja sama dengan mitra pembangunan, NAM SSTC Center, berencana membangun pusat pelatihan pertanian regional untuk wilayah pasifik di Fiji sebagai salah satu tindak lanjut keseriusan Pemerintah Indonesia terhadap kerja sama pertanian dengan Pemerintah Fiji. Pusat pelatihan ini nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan oleh negara-negara Pasifik lainnya yang berbatasan dengan Fiji.

Hubungan Indonesia dan Fiji bukan sekadar hubungan diplomatik bilateral di kancah internasional, namun hubungannya sudah merupakan saudara yang berasal dari perbatasan timur Indonesia. Sebagai bentuk nyata solidaritas pembangunan sesama negara berkembang, Pemri memberikan bantuan kerja sama teknik pertanian kepada Pemerintah Fiji untuk bersama-sama menstabilkan pasokan pangan di tingkat regional melalui program Program Introduksi Mekanisasi Pertanian. Hal ini berkaca pada pengalaman keberhasilan Indonesia pada program serupa, sehingga saat ini mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan di dalam negeri, bahkan bisa melakukan ekspor ke sejumlah negara tetangga.

Kementan telah melaksanakan Program Introduksi Mekanisasi Pertanian dengan berpayung pada MoU Kerja Sama Bidang Pertanian RI-Fiji yang telah ditandatangani oleh Menteri Pertanian RI, Dr. Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Pertanian Fiji, Mr. Inia B. Seruiratu, pada 9 Agustus 2017 lalu di Jakarta. Kerja sama bantuan teknis berupa pemberian 100 unit traktor tangan yang akan dikelola oleh beberapa kelompok petani yang berlokasi di sejumlah sentra produksi pertanian di Fiji.

Selain bantuan alat mesin pertanian, Kementan juga memberikan dukungan pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan pertanian. Dukungan ini telah terealisasi dengan dilaksanakannya *Agricultural Mechanization Training Program* Indonesia-Fiji pada 10-17 Desember 2018 di Yogyakarta.

Kerja sama teknis antara Pemri dan Pemerintah Fiji juga dilakukan dalam bentuk pengembangan benih/bibit unggul untuk peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan peternakan dan dukungan pengembangan lembaga riset di Fiji yang meliputi lembaga riset pascapanen, mekanisasi, benih/bibit, pengendalian hama, kultur jaringan, dan kimia tanah.

Diharapkan ke depannya dengan berdirinya pusat pelatihan yang dimiliki oleh Pemri di tanah Fiji dapat mengharumkan nama Indonesia. Ditambah lagi dengan masuknya tenaga ahli dan produk pertanian (alsintan, bibit, komoditas) unggulan pada program kerja sama Indonesia – Fiji, dapat membuka peluang akses pasar dan menjadikan acuan bagi pembangunan pertanian negara-negara Pasifik, khususnya Fiji.



Bantuan Mekanisasi Indonesia di Fiji

Sejak tahun 1980-an Kementerian Pertanian RI telah secara aktif melaksanakan lebih dari 100 proyek kerja sama teknis di bidang pertanian bagi lebih dari 50 negara di Asia, Afrika, dan Pasifik, termasuk di Palestina, di antaranya dengan mengirimkan bantuan peralatan pertanian; mendirikan Pusat Pelatihan Pertanian (*training center*) serta mengirimkan tenaga ahli untuk mendukung peningkatan kapasitas petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Berbagai proyek ini mencakup ke dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Indonesia. Pada umumnya bantuan teknis yang diselenggarakan oleh Kementan berdasarkan pada permintaan dari Tim Koordinasi Nasional (Kornas) KSS Indonesia maupun mitra pembangunan.

Keberhasilan Kementan dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) ini telah mendapatkan pengakuan dari Direktur KSS-FAO yang menyampaikan, "Indonesia merupakan salah satu negara kunci KSS. FAO sangat mengapresiasi kemajuan yang dicapai oleh Indonesia dalam mendukung negara berkembang lainnya", di sela-sela Sidang FAO *Conference* ke-41, bulan Juni 2019 di Roma, Italia.



Menduniakan Tenaga Ahli Pertanian Indonesia Melalui FAO *South-South Cooperation Gateway* dan Rencana Penandatanganan MoU

FAO South-South Cooperation Gateway



FAO mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan Pemri dan mengharapkan penguatan kolaborasi antar program, baik di antara negara anggota ataupun dengan FAO. Untuk itu, FAO mengusulkan penyusunan Nota Kesepahaman (MOU) penguatan KSST antara FAO dan Indonesia. MOU ini rencananya akan ditandatangani bersamaan dengan perayaan Hari Pangan Sedunia ke-39 yang akan diselenggarakan pada akhir Oktober tahun ini di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Selain itu, pada kesempatan yang sama juga direncanakan akan dilakukan peluncuran *South South Gateway* sebagai media untuk berbagi pengetahuan dan informasi terkait program dan capaian yang telah dihasilkan dari berbagai kerja sama dalam kerangka SSTC. Situs ini menampilkan *database* pusat pelatihan ataupun tenaga ahli yang dimiliki dalam bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara anggota FAO dalam rangka mempromosikan KSST. Beberapa negara yang telah memanfaatkannya adalah Argentina, Chili, Tiongkok, Costa Rica, Iran, Israel, Kyrgyzstan, Morocco, Namibia, Peru, Senegal, dan Uruguay.

Platform ini penting bagi Indonesia agar berbagai upaya Pemri dapat dipromosikan ke dunia. Melalui kerja sama teknik antar negara berkembang, Indonesia dapat berbagi pengalaman dan menunjukkan keunggulan dalam berbagai bidang yang selama ini telah mendapat pengakuan negara berkembang. Untuk itu, diharapkan kontribusi aktif dari seluruh pemangku kepentingan KSST di Indonesia terkait data dan informasi agar promosi global para tenaga ahli pertanian dan unit teknis pertanian unggulan di daerah dapat semakin optimal.

Ormas Asing Mercy-USA: Mitra Pemerintah dalam Menjalankan Program Pertanian

Kementerian Pertanian mendorong kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka percepatan pembangunan pertanian, salah satunya dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing.

Kerja sama antara Pemerintah dan ormas asing diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan kapasitas masyarakat dan transfer teknologi serta informasi di daerah sesuai dengan kebutuhan lokal.

Mercy-USA for Aid and Development (Mercy-USA), saat ini, merupakan satu-satunya ormas asing yang bermitra dengan Kementan dalam mendukung program pertanian di Indonesia.

Penandatanganan MSP Kerja Sama Periode 2019 - 2021

Kerja sama Kementan dengan Mercy-USA telah dilakukan sejak tahun 2010. Mercy-USA merupakan ormas asing yang berkantor pusat di negara bagian Amerika Serikat dengan fokus utama organisasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pendidikan di seluruh dunia.



Cakupan wilayah kerja Mercy-USA di Dunia



MSP kerja sama antara kedua pihak telah ditandatangani di Jakarta pada 9 Mei 2019. Untuk Kementan RI, penandatanganan MSP tersebut diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementan RI, Syukur Iwantoro, sementara untuk Mercy-USA, diwakili oleh *Country Director*, Ghassan Husni.

Pada periode MSP ketiga ini, kerja sama dengan Mercy-USA akan difokuskan pada bidang peternakan dan tanaman pangan yang secara langsung dipadukan dengan program pemerintah. Pengembangan bidang peternakan dan tanaman pangan tersebut dilaksanakan melalui pemberian *input*, seperti sapi dan kandangnya yang diintegrasikan dengan pengembangan desa pertanian organik padi dan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO).

Program tersebut akan dilaksanakan di wilayah kerja yang sudah disepakati, yakni Sumatra Utara, Sumatra Barat, serta Jawa Barat dengan anggaran sebesar USD 654.600,00 untuk tiga tahun (2019 s.d. 2021). Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor akan dilibatkan dalam implementasi program kerja di wilayah Jawa Barat.

Implementasi Kerja Sama Kementan RI dan Mercy-USA di Indonesia

Mercy-USA beroperasi di Indonesia sejak tahun 2005. Pada awalnya, Mercy-USA bekerja berdasarkan mandat dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam sesudah gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Provinsi Aceh tahun 2004. Pada saat itu, Mercy-USA di Indonesia berkedudukan di Banda Aceh selama lima tahun untuk melaksanakan beberapa proyek rehabilitasi pasca bencana.

Sejak Maret 2010, Mercy-USA sudah teregistrasi di Kementerian Luar Negeri dan diarahkan agar lebih fokus pada satu bidang dalam melakukan kegiatan utamanya. Setelah peninjauan kerja sama dengan mitra kerja Kementan, penandatanganan MSP pertama kali dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2010. Kantor perwakilan Mercy-USA di Indonesia berlokasi di kota Medan.

Melalui proyek *Enhanced Livelihoods through Implementation Sustainable Agriculture* (ELISA) I dan II, Mercy-USA memberikan bantuan sarana produksi dan pelatihan serta pendampingan kepada kelompok petani dan peternak di wilayah Sumatera (Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jambi) senilai USD 509.197.

Pada periode kedua (2014 s.d. 2017), Mercy-USA menambahkan Jawa Barat sebagai wilayah kerja setelah dilakukan amandemen MSP pada tahun 2017 serta menetapkan wilayah kerjanya menjadi Sumatra Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Untuk proyek ELISA III dan IV, Mercy-USA menganggarkan dana sebesar USD 650.000.



Implementasi Mercy di Jawa Barat



Monitoring dan Evaluasi di Sumatera Barat



Implementasi Mercy di Sumatera Utara



Kementan Dorong Kerja Sama Penanganan *Food Loss and Waste* antar CSO Indonesia - Turki

Penanganan *food loss and waste* (FLW) menjadi fokus kegiatan *study visit* Turki ke Indonesia dalam kerangka kerja sama COMCEC (*Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation*). Dalam kunjungan lapangan ke salah satu *civil society organization* (CSO) yang bergerak dalam pengelolaan *food waste*, yaitu *Foodbank of Indonesia* (FOI), delegasi Turki yang diwakili oleh Deputy Dirjen Kerja Sama Uni Eropa dan Luar Negeri, Kementerian Pertanian dan Kehutanan Turki, Mr. Ahmet Vulkan, serta Prof. Hami Alpas dari *Middle East Technical University of Turkey*, berdiskusi mengenai program-program pemanfaatan *food waste* yang dilakukan FOI. Delegasi juga melakukan pertukaran informasi terkait implementasi penanganan *food waste* di kedua negara.



Dalam paparannya kepada para delegasi, FOI (foodbankindonesia.org) memaparkan lima program utama pemanfaatan *food waste* dari perusahaan-perusahaan pangan, baik produsen maupun ritel, di antaranya Pos Pangan, Mentari Bangsa, Sayap Dari Ibu (SADARI), Indonesia Ceria, dan *Blessing to Share*.

World's Largest Food Wasters



Sebanyak 13 juta metrik ton makanan terbuang setiap tahunnya. Angka tersebut dapat memberi makan hampir 11% populasi Indonesia atau sekitar 28 juta penduduk setiap tahunnya. Angka yang hampir sama dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Angka tersebut, menurut FOI, tidak bisa hanya diselesaikan melalui peningkatan produksi ataupun kapasitas lumbung pangan, namun juga diperlukan langkah-langkah efisiensi, salah satunya dengan menekan angka *food waste*.

Selanjutnya, pihak delegasi Turki menyampaikan apresiasi mereka terhadap program dan aktivitas lembaga CSO seperti FOI. Pihak Turki menyampaikan selain *partnership* bersama lembaga-lembaga seperti FOI, kampanye-kampanye dalam rangka menekan *food waste* juga telah masif dilaksanakan di Turki dan sejauh ini telah berhasil menekan angka *food waste* secara signifikan.



Delegasi Turki juga berkesempatan mengunjungi salah satu sekolah penerima manfaat program FOI, yaitu SD Negeri Gandaria Utara 11 Pagi dan turut serta membagikan makanan tambahan gratis bagi anak-anak sekolah yang bahan-bahannya berasal dari *leftover food* yang dikumpulkan oleh FOI.

Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi titik awal reduksi FLW secara berkesinambungan. Berbagai capaian penelitian telah berhasil dikembangkan Badan Litbang Pertanian dalam menekan *loses* produksi pangan di tingkat hulu. Namun, dalam level implementasi, masih perlu diidentifikasi berbagai kemungkinan tindak lanjut penanganan FLW di berbagai sub-sektor pertanian.



FASILITASI INVESTASI



Indonesia Miliki Unit Pengolahan Sagu Terintegrasi Pertama di Dunia dengan Bantuan FAO



Proyek Kemitraan Publik-Swasta untuk Perbaikan Sistem Pemasaran dan Distribusi Produk Pertanian



SMARTD, Proyek Pinjaman Kementan dengan Penyerapan & Penyelesaian Terbaik

Indonesia Miliki Unit Pengolahan Sagu Terintegrasi Pertama di Dunia dengan Bantuan FAO

Dalam rangka mewujudkan penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal serta untuk mengurangi ketergantungan sumber karbohidrat dari beras, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, bekerja sama dengan FAO telah mendirikan unit pengolahan sagu terpadu di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara melalui proyek pilot *Technical Cooperation Programme (TCP)* FAO, yaitu *“Promoting Sago Starch Utilization in Indonesia.”*

Program bertujuan untuk: (i) mengembangkan perkebunan sagu yang lebih efisien melalui pendekatan agroekonomi dan meningkatkan kualitas serta produktivitas yang lebih baik; (ii) membangun unit pengolahan sagu yang terintegrasi, higienis dan tanpa limbah; dan (iii) menciptakan unit usaha pengolahan dan pemasaran sagu yang terintegrasi.

Sulawesi Tenggara merupakan provinsi terbesar penghasil sagu di Indonesia setelah Papua. Sejak dahulu kala, masyarakat di Sulawesi Tenggara memanen pohon sagu liar dari hutan dengan cara tradisional.



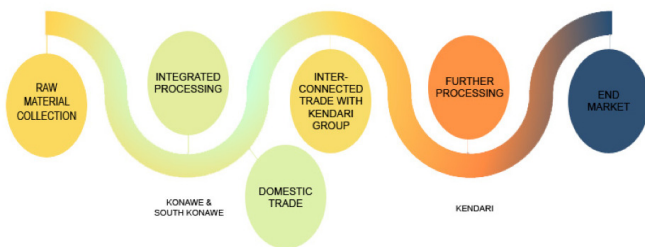
Sejak 2016, bekerja sama dengan FAO serta pihak Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara, Kementan telah merintis kegiatan pengelolaan sagu untuk menghasilkan pati sagu yang lebih layak dikonsumsi dan memiliki nilai komersial yang lebih tinggi. Kegiatan yang dilakukan melalui program ini yaitu meliputi pengembangan kemampuan teknis dalam memproduksi sagu, ekstraksi pati sagu, serta peningkatan nilai tambah sagu secara berkelanjutan dan lebih menguntungkan.



Sagu dapat dipromosikan sebagai bahan pangan lokal yang sangat sehat untuk dikonsumsi karena mengandung karbohidrat namun bebas gluten dan rendah kalori serta rendah indeks glikemik.

Bentuk kegiatan yang melibatkan kelompok tani di Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ini, termasuk pemrosesan sagu tanpa limbah. Limbah kulit pohon sagu digunakan untuk membuat arang, dan ampas sagu digunakan sebagai media tumbuh jamur, serta limbah cairnya dapat diproses menjadi biogas atau etanol. Konsumsi pati sagu di Indonesia menawarkan peluang yang cukup besar dalam berkontribusi pada penghapusan kerawanan pangan. Ekstraksi dan pemanfaatan pati adalah kunci untuk meningkatkan pemanfaatan pati sagu.

Sepanjang pelaksanaan program, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kab. Konawe, Konawe Selatan, dan Kota Kendari telah memfasilitasi dan memberikan dukungannya. Melalui program ini, sagu dikelola secara semi modern sehingga menghasilkan produk sagu yang higienis, putih, bersih, dan bernilai tinggi. Dari sisi pengembangan bisnis, program telah membentuk unit usaha sagu yaitu *Sagu Meambo Food*, yang difokuskan di Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan, sedangkan untuk unit promosi dan penjualan difokuskan di Kota Kendari. Sagu dijual dalam bentuk tepung sagu kering serta beberapa produk olahan seperti brownis dan *cookies*.



Alur unit pengelolaan sagu terpadu di Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan mulai dari budidaya pohon sagu sampai dengan pemasaran.



Chips dan biskuit "Saguku", produk kelompok binaan proyek

FAO telah menyatakan dukungannya terkait dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mempromosikan Gerakan Diversifikasi Konsumsi Pangan Menuju Pola Konsumsi yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman. Oleh karena itu, FAO berkomitmen untuk melakukan kerja sama pelatihan dengan melibatkan pakar internasional untuk mengkaji proyeksi pola konsumsi pangan di Indonesia hingga tahun 2045.

Dampak Proyek

Kesadaran masyarakat terkait potensi sagu dan sistem berkebun sagu meningkat

Produksi pati sagu yang higienis, putih, bersih dan tanpa limbah

Hasil dan produksi pati sagu meningkat

Sistem perdagangan yang terintegrasi dan adil

Pendapatan dari beragam produk olahan berbasis sagu meningkat

Sagu menjadi lebih menarik dan menguntungkan sebagai komoditas



Proyek Kemitraan Publik-Swasta untuk Perbaikan Sistem Pemasaran dan Distribusi Produk Pertanian

Proyek Kemitraan Publik-Swasta untuk Perbaikan Sistem Pemasaran dan Distribusi Produk Pertanian (*Public Private Partnership Project for Improvement of The Agriculture Product Marketing and Distribution System in Indonesia*) merupakan proyek kerja sama antara Direktorat Jenderal Hortikultura dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) yang dimulai sejak Maret 2016 dan direncanakan akan selesai pada Desember 2019.

Proyek ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya permintaan sayuran dan buah yang aman berkualitas tinggi di Indonesia, namun kondisi sektor pertanian domestik belum dapat memenuhi peningkatan permintaan tersebut, utamanya dikarenakan besarnya tantangan yang dihadapi petani sebagai akibat dari:

- Manajemen budidaya yang tidak tepat untuk meningkatkan kualitas produk;
- Keterlibatan banyak perantara;
- Tidak berkembangnya jaringan rantai pasok dan infrastruktur transportasi;
- Kurangnya aliran modal; serta
- Kesulitan dalam menjangkau benih varietas baru dan berkualitas tinggi.

Dengan demikian, diperlukan perbaikan rantai pasok produk hortikultura yang aman dan berkualitas tinggi antara kelompok tani dengan pasar modern.

Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Jepang melakukan kerja sama teknis yang bertujuan untuk perluasan rantai pasok produk pertanian yang aman dan berkualitas tinggi. Kegiatan dilakukan dengan memodernisasi sistem produksi dan distribusi produk pertanian yang aman dan berkualitas tinggi, sehingga diharapkan akan mampu memberikan manfaat lebih bagi petani.

Proyek dikembangkan bagi kelompok tani di lokasi percontohan di Provinsi Jawa Barat, di mana komponen kegiatan mencakup: (i) Perbaikan produksi dan teknik manajemen di lahan milik petani sasaran proyek; dan (ii) Pengembangan saluran distribusi dan Pemasaran produk pertanian dari kelompok tani sasaran ke pasar modern.

Total penerima manfaat dalam pelaksanaan proyek ini sebanyak 31 kelompok tani dengan jumlah keseluruhan 234 orang petani peserta yang berlokasi di 8 kota dan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat (Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Garut).

Terdapat 9 (sembilan) komoditas yang dipilih sebagai proyek percobaan, yaitu cabai, tomat *beef*, tomat lokal, paprika, wortel kuroda, brokoli, buncis, kyuri dan jambu kristal. Komoditas tersebut dipilih karena para petani dapat menunjukkan dampak yang nyata dalam kualitas komoditas tersebut dengan teknik-teknik yang diperkenalkan oleh proyek pada saat kegiatan identifikasi untuk pemilihan komoditas.

Berbagai capaian kegiatan yang telah dilaksanakan, diantaranya:

1. Bekerja sama dengan PT. Tani Murni dan Takii Co. Ltd. untuk penyediaan benih sayuran asal Jepang
2. Bekerja sama dengan Unitika Ltd melaksanakan proyek percobaan penggunaan pass lite yang merupakan produk pelindung tanaman milik Unitika Ltd., di Koperasi Gerbang Emas di Kabupaten Bandung Barat dan PT. Saribhakti di Kabupaten Bandung.
3. Bekerja sama dengan PT. Calbee-Wings Food untuk produksi kentang di Gapoktan Cikandang Agro di Kabupaten Garut dan Kelompok Tani Mekartani di Kabupaten Bandung.
4. Bekerja sama dengan Shimota Farm, sebuah perusahaan agribisnis di Jepang yang memperkenalkan manajemen tanah dan teknologi dalam memproduksi kompos.
5. Pelatihan di Jepang untuk para *counterpart* dan kelompok tani peserta proyek yang mencakup pengenalan teknologi budidaya, penanganan pasca panen, dan sistem distribusi produk pertanian di Jepang.
6. Bekerja sama dengan BTPN untuk memfasilitasi petani dalam mendapatkan akses pinjaman KUR (pinjaman yang disubsidi pemerintah). Jumlah pinjaman KUR ini maksimal adalah Rp, 25.000.000,- per orang dan tanpa jaminan.
7. Pemasaran Produk ke Pasar Retail dan Supermarket



Opening Ceremony



Project's Booth



Penyelenggaraan kegiatan "Farm to Table" 2018 di AEON BSD Mall yang melibatkan 12 (dua belas) kelompok tani dan perwakilan dari Kantor JICA Indonesia. Kegiatan ini diliput oleh media Jepang (Jakarta Shimbun dan NNA). Dari kegiatan ini, jumlah total penjualan mencapai IDR. 56.677.950,-. Nilai ini meningkat sekitar 56% dibandingkan dengan hasil penjualan pada *Farm to Table* pada tahun 2017.

SMARTD, Proyek Pinjaman Kementan dengan Penyerapan & Penyelesaian Terbaik



Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD) merupakan proyek pinjaman luar negeri dari Bank Dunia yang telah melengkapi kegiatan Balitbangtan di seluruh Indonesia selama 7 tahun, sejak 25 Oktober 2012 s.d. 30 Juni 2019.

SMARTD telah menerima penghargaan nasional dari Kementerian Keuangan pada acara *workshop* Pinjaman dan Hibah pada tanggal 19 Juli 2018 sebagai peringkat I proyek dengan penyerapan terbaik.

Sekretaris Balitbangtan, Muhammad Prama Yufdy, dalam sambutannya pada kegiatan *Workshop* Penyusunan *Project Completion Report and Evaluation* SMARTD Balitbangtan 2012-2019 tanggal 19 - 21 Juni 2019 di Denpasar, Bali, menyampaikan pentingnya pemeliharaan atas segala perlengkapan dan bangunan yang telah didanai proyek SMARTD. Lingkungan aman dan terpelihara perlu terus dijaga dengan anggaran yang tersedia, sedangkan dari sisi pengadaan barang dan jasa, SMARTD perlu dilakukan evaluasi termasuk membahas apa saja yang belum diselesaikan dan bagaimana solusinya.

Sebanyak 1960 pegawai telah diikuti dalam program peningkatan kapasitas SDM melalui *training* jangka pendek dan jangka panjang dengan pendanaan SMARTD. *Training* jangka panjang berupa pemberian kesempatan beasiswa ke universitas di luar negeri untuk jenjang pendidikan S2 dan S3. Sedangkan *training* jangka pendek berupa pembiayaan *short/long course, post doc* dan *sandwich program*. Beberapa staf masih dalam proses belajar ketika Proyek SMARTD berakhir.





Untuk keberlanjutan program peningkatan kapasitas SDM tersebut, sesuai amanat Kepala Badan, akan disiapkan pendanaannya melalui APBN. Kegiatan kerja sama penelitian yang telah dirintis SMARTD, mulai dari KKP3N hingga KP4S perlu dikelola, dievaluasi dan dilanjutkan di masa yang akan datang.

Sekretaris Balitbangtan menyampaikan terima kasih atas pengelolaan proyek SMARTD, dan mengingatkan perlunya persiapan pertanggungjawaban sebaik mungkin mengingat proyek telah berakhir.

Task Team Leader Proyek SMARTD dari *World Bank*, Jan Joost Nijhoff menyampaikan apresiasi atas penyelesaian SMARTD yang impresif yang mencakup pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur, pengadaan peralatan laboratorium, dan manajemen penelitian serta dukungan kebijakan.



KOMPONEN PROYEK SMARTD

- | | |
|---|---|
|  Pengelolaan & pengembangan SDM |  Manajemen penelitian & dukungan kebijakan |
|  Peningkatan infrastruktur & fasilitas |  Manajemen kegiatan, monitoring & evaluasi |



HIGHLIGHTS PERTEMUAN KLN APRIL - MEI - JUNI 2019



Pertemuan Menteri Pertanian G20 (*G20 Agriculture Ministers' Meeting*) Presidensi Jepang telah berlangsung pada tanggal 11-12 Mei 2019 dan dihadiri oleh seluruh menteri negara anggota G20. Di bawah Presidensi Jepang, pertemuan AMM G20 mengangkat tema "*Toward Sustainable Agro-Food Sector: Emerging Issues and Good Practices*" dan membahas isu-isu terkait inovasi sektor pertanian, rantai nilai pangan dan kontribusinya terhadap pencapaian SDGs. Pertemuan berhasil mengadopsi Deklarasi Menteri Pertanian G20 yang mengangkat tiga topik utama, yaitu (i) *Innovation toward future sustainability of the agro-food sector*; (ii) *Food value chains toward inclusive growth of the agro-food sector*; dan (iii) *Knowledge exchange to address global issues*.

Pentingnya Kesetaraan Akses Digitalisasi dan Inovasi dalam *G20 Agriculture Ministers' Meeting*, 11-12 Mei 2019 (Niigata, Jepang)



HIGHLIGHTS PERTEMUAN KLN APRIL - MEI - JUNI 2019

Committee on Agriculture Regular ke-91, WTO, 25-26 Juni 2019 (Jenewa, Swiss)



Pada Sidang ke-91, Delri diwakili oleh Staff Khusus Menteri Perdagangan dan Kepala Bagian Multilateral, Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementan, dan didampingi oleh perwakilan dari PTRI Jenewa. Pertemuan CoA-RS ini merupakan pertemuan reguler yang membahas kepatuhan kebijakan semua anggota WTO terhadap implementasi Persetujuan Pertanian (AoA), berbagai notifikasi anggota terhadap tiga pilar pertanian (akses pasar, dukungan domestic dan subsidi ekspor), dan kepatuhan terhadap implementasi Persetujuan Pertanian.

Indonesia Dukung *Application Robotic and Drone* pada Sidang AIWGAF ke 6 (Bangkok, Thailand)



Sidang ke-6 *ASEAN India Working Group on Agriculture and Forestry* dilaksanakan di Bangkok, Thailand. Delegasi RI pada sidang kali ini dipimpin oleh Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, BPPSDMP, Dr. Idha Widi Arsanti. Pada pertemuan ini, didiskusikan bersama-sama ASEAN Member Countries (AMS) lainnya beberapa isu strategis. Indonesia mengusulkan dua proposal proyek berjudul 1) *Workshop on The Role of Agricultural Workers in Dissemination on Agricultural Innovation* yang akan dilaksanakan pada bulan September 2019, dan 2) *Improving Role of Youth in Agriculture Development in the Era Industry 4.0 and Strengthening ASEAN India Cooperation through Research and Training* yang diusulkan dilaksanakan di tahun 2020. Kedua kegiatan yang diangkat tersebut bersinergi dengan tujuan strategis Menteri Pertanian dalam mendorong *Agriculture 4.0* di Indonesia.

Pertemuan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ke-27, 24 Juni - 3 Juli 2019 (Melbourne, Australia)*



Pertemuan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ke-27* dilaksanakan tanggal 24 Juni - 3 Juli 2019 di Melbourne, Australia. Pertemuan dihadiri oleh para delegasi dari 16 negara RCEP. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Perundingan ASEAN, Kemendag, sementara RCEP-TNC Leader, Iman Pambagyo, Dirjen PPI, Kementerian Perdagangan. Pembahasan masing-masing *Working Group (WG)* dan *Sub Working Group (SWG)* telah dilakukan sebelum *Opening Ceremony* tanggal 29 Juni 2019. Dalam sambutannya, *TNC Leader* menyampaikan agar komitmen semua *Chair* dan para negosiator setiap *WG* dan *SWG* untuk selalu mengedepankan prinsip dan disiplin yang telah disepakati bersama dalam penyelesaian setiap *pending issues* sehingga perundingan RCEP dapat selesai pada tahun 2019 dan ditandatangani tahun 2020.

HIGHLIGHTS PERTEMUAN KLN APRIL - MEI - JUNI 2019

ASEAN Working Group on Agricultural Training and Extension (AWGATE), 1 Juli 2019 (Brunei)



ASEAN Working Group on Agricultural Training and Extension (AWGATE) mengadakan sidang ke-26 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darusalam, Senin, 1 Juli 2019. Delegasi RI dipimpin oleh Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, BPPSDMP, Dr. Siti Munifah, bersama Dr. Zahron Helmy dari Pusat Pelatihan Pertanian. Topik pembahasan sidang 26th AWGATE ini adalah modernisasi pertanian dan peran generasi muda pertanian dalam mengembangkan sektor pertanian melalui penyuluhan dan pelatihan dengan melibatkan pihak swasta. Pada sidang ini, Indonesia mengusulkan tema agenda tahun 2019, yakni *Training and Workshop on the Role of Agricultural Extension in Reinforcing Agricultural Innovation System (AIS)*. Agenda tersebut akan dilaksanakan di Yogyakarta pada minggu kedua bulan September 2019. Sebagian besar AMS sepakat untuk mengirimkan beberapa perwakilan untuk mengikuti pelatihan dan *workshop* tersebut.



Pertemuan tahunan
UNESCAP ke-75

Pemerintah Indonesia dan Thailand sepakat melakukan harmonisasi upaya pembentukan organisasi antar-pemerintah baru. Hal ini disepakati di sela pertemuan tahunan *UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) ke-75*, 27 – 31 Mei 2019, di Bangkok, Thailand. Delri dipimpin oleh Kepala Bagian Regional Kementan. Sekretariat UNESCAP, Mr. Kaveh Zahedi, menjanjikan empat tindak lanjut dalam membantu proses transisi CAPSA: (i) semua aset dan keuangan akan diserahkan kepada organisasi baru; (ii) sisa anggaran eks CAPSA baru dapat dimanfaatkan jika telah terbentuk organisasi baru; (iii) Sekretariat UNESCAP telah mengidentifikasi nama-nama tenaga ahli yang memiliki pengalaman dalam pembentukan organisasi internasional sejenis; (iv) Sekretariat UNESCAP akan mengirimkan daftar nama *focal point* eks CAPSA untuk mempermudah Indonesia dalam membangun komunikasi baru dengan negara-negara tersebut hingga mendapatkan dukungan.

KEGIATAN BIRO KLN APRIL - MEI - JUNI 2019

Orientasi Kebijakan Pertanian bagi Diplomat RI (Lampung, 18-21 Juni 2019)



Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementan telah menyelenggarakan kegiatan Orientasi bagi diplomat RI yang akan ditempatkan di negara mitra pada tanggal 19-20 Juni 2019 di Hotel Horison Lampung dan dihadiri oleh 60 orang diplomat RI. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan rutin tahunan yang dilakukan oleh Biro KLN Kementan dalam rangka meningkatkan pemahaman bagi diplomat RI mengenai potensi dan kebijakan di bidang pertanian.

Salah satu komoditas unggulan ekspor hortikultura dari Provinsi Lampung adalah nanas dan pisang. Komoditas nanas baik dalam bentuk nanas kaleng, jus nanas, dan selai nanas dari Lampung telah diekspor ke berbagai negara seperti Australia, Argentina, Belgium, Algeria, American Samoa dan negara lainnya. Sedangkan komoditas pisang dari Lampung telah diekspor ke China, Hongkong, Jepang dan Korea.

Ekspor komoditas pertanian seringkali dikenai hambatan non tariff yaitu berupa *technical barrier to trade* (TBT) dan *sanitary and phytosanitary* (SPS). Dalam hal ini, optimalisasi peran diplomat RI dalam pengembangan pasar dan promosi perdagangan produk hortikultura Indonesia, informasi pasar komoditi ekspor kepada dunia usaha serta peningkatan upaya kontak bisnis dan kerja sama luar negeri sangatlah penting.

Pada kesempatan tersebut, para Diplomat juga melakukan kunjungan lapang ke PT. *Great Giant Pineapple* yang merupakan salah satu produsen dan eksportir komoditas hortikultura, seperti pisang, nanas, dan jambu Kristal. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang telah menerapkan *integrated farming model* dan juga telah mengaplikasikan *zero waste management*.

Tenaga Ahli Pertanian Indonesia Bantu Mengentaskan Kelaparan dan Kemiskinan Global (Malang, 25-26 Juni 2019)

Kementerian Pertanian selaku *implementing agency* KSS menyusun inisiatif Rencana Aksi Strategis Nasional Pertanian tahun 2020-2022, yang merupakan pemutakhiran program kegiatan dan tenaga ahli pertanian unggulan milik Kementan yang siap dikerjasamakan melalui Tim Koordinasi Nasional (Tim Kornas) KSS Indonesia, negara mitra dan mitra pembangunan. Isu utama difokuskan pada peningkatan produksi ternak dan tanaman pangan, yang diharapkan akan berkontribusi pada upaya pengentasan kelaparan dan kemiskinan secara global, khususnya di daerah pedesaan. Semangat ini merupakan perwujudan dari pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) 1 dan 2.

Rencana Aksi ini didiseminasikan pada acara *Workshop on the Agricultural National Strategic Action Plan for SSTC Implementation in Achieving SDGs 1 and 2*, yang diikuti oleh Tim Kornas KSS Indonesia, mitra pembangunan di Indonesia dan jajaran unit teknis Kemtan. Bekerja sama dengan Tim Kornas KSS, Kementan berharap dapat menjadi *matchmaker* pengembangan program KSS pertanian dari Rencana Aksi Strategis Nasional Pertanian tahun 2020-2022 yang telah disusun, dengan selalu melibatkan para mitra pembangunan terkait. Implementasi KSS dan Triangular dari Rencana Aksi diharapkan akan membawa manfaat konkret untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani pedesaan di Indonesia maupun di negara selatan-selatan dalam mengentaskan kemiskinan dan kelaparan, sebagaimana tertuang di dalam tujuan SDGs 1 dan 2.



KEGIATAN BIRO KLN APRIL - MEI - JUNI 2019

Pentingnya Evaluasi SPI dan Team Work dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Biro KLN

Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementan secara rutin melaksanakan Sistem Pengendalian Internal (SPI) sebagai bagian dari upaya mengevaluasi pelaksanaan SPI atas capaian target kinerja maupun target anggaran. Untuk SPI Kedua, telah dilaksanakan di Hotel Alila Solo, Jawa Tengah pada tanggal 14-16 Juni 2019. Pertemuan SPI ini lebih menitikberatkan pada evaluasi terhadap capaian Semester Pertama tahun 2019, rencana kerja sampai dengan bulan Desember 2019 dari masing-masing Bagian lingkup KLN.



Kepala Biro KLN menyampaikan arahan terkait pentingnya pengawalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dan perhitungan tukin sebagai unsur penilaian kinerja. Diharapkan seluruh pegawai Biro KLN tidak hanya memahami tugas, pokok dan fungsi di Bagian-nya saja, tetapi juga perlu mengetahui dan memahami pekerjaan di Bagian lain. Baik atau buruknya suatu organisasi, penilaian oleh individu atau organisasi lainnya, bergantung pada pemahaman yang kita miliki terhadap organisasi tersebut.



Terkait peningkatan kapasitas SDM di Biro KLN, seluruh pegawai Biro KLN diharapkan terus meningkatkan kemampuan melalui: (i) peningkatan kemampuan bahasa asing; (ii) melanjutkan studi S2/S3 di luar negeri; serta (iii) memanfaatkan fasilitas kantor untuk hal positif yang mendukung tugas kedinasan. Empat tim internal di Biro KLN: (i) Tim Perencanaan; (ii) Tim Money; (iii) Tim Database; dan (iv) Tim Publikasi Dokumentasi Informasi dan Buletin (PDIB) juga diharapkan dapat semakin menunjang kinerja Biro KLN.

Selain acara formal, juga dilaksanakan kegiatan *outbond* dan *river tubing* di Senatah Adventure Tubing, Gadungan, Solo, Jawa Tengah. Permainan Arung Jeram ini diawali *games* kelompok yang berhasil menciptakan keakraban, kerja sama dan kekompakan tim.

Agenda Kegiatan Kerja Sama Luar Negeri

JUL - AUG - SEPT 2019

Jul

- ASEAN JCM in Agriculture and Forest Product Promotion Scheme (Kinabalu-Malaysia)
- 7th Annual Pocal Points Meeting of the COMCEC (Istanbul, Turkey)
- Working Group on Agriculture, Food and Forestry Cooperation (WGAFF) Indonesia-Australia ke-22 (Lampung)
- Pertemuan Teknis Indonesia - Belarusia (Serpong)
- Focus Group Discussion (FGD) Kajian Request dan Offer List Komoditas Pertanian dalam Kerangka Perundingan Bilateral (Bogor)
- Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Daerah (Bandung dan Pontianak)
- Consultation Meeting on Agricultural Cooperation between IETO-TETO ke-4 (Jakarta)

Aug

- ASEAN SSOM-40 AMAF, SSOM-18 AMAF +3, ARSOMA-4 (Hue City, Viet Nam)
- ASEAN Food Security Reserve Board (AFSRB) ke-39 (Thailand)
- IMT-GT WGAA Meeting (Thailand)
- APEC Bidang Ketahanan Pangan (PPFS, HLPDAB, ATCWG) dan Pertemuan Tingkat Menteri Bidang Ketahanan Pangan (Puerto Varas, Chile)
- IMT-GT WGTI Meeting (Medan, Indonesia)
- BIMP-EAGA WGA Meeting (Serawak, Malaysia)
- IOFS GA (Jeddah, Saudi Arabia)
- Workshop Kajian Request dan Offer List Komoditas Pertanian dalam kerangka Perundingan Bilateral (Belitung)
- Sosialisasi Optimalisasi Peran dan Fungsi Ormas Asing untuk Pemberdayaan Petani (Yogyakarta)
- Joint Working Group on Agriculture India dan Indonesia ke-5 (India)
- Diklat Teknis Rancang Bangun Perdagangan Internasional (Bogor)
- Capacity Building on GIAHS Management Training (Korea Selatan)

Sept

- COMCEC AWG Meeting ke-2 (Turki)
- Sidang Executive Board IFAD ke-127 (Roma, Italia)
- Sidang ICCO Council ke-100 (Abidjan, Côte d'Ivoire)
- Sidang ICO Council ke-124 (London, Inggris)
- Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Daerah (Bandung dan Pontianak)
- Workshop Modalitas Perundingan WTO (Yogyakarta)



Tim Redaksi Buletin

Diplomasi

Biro Kerja Sama Luar Negeri
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian
Jl. Harsono RM No. 3, Gedung A Lt. 6
Ragunan, Jaksel 12550
email: publikasi.kln@gmail.com
www.pertanian.go.id